

DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN PENDEKATAN MAKROEKONOMI

Khubbi Abdillah^{1*}, Agus Sarwo Edi², Aminatuzzuhro³

^{1,2,3} Universitas Wijaya Putra

khubbiabdillah@uwp.ac.id^{1*}, agussarwo@uwp.ac.id², aminatuzzuhro@uwp.ac.id³

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis determinan tingkat kemiskinan di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan makroekonomi yang bersumber dari data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2023. Indikator data makroekonomi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan gender, derajat desentralisasi fiskal, dan belanja modal. Teknik analisis yang digunakan dalam memecahkan penelitian ini dengan model panel FD-GMM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka, gini rasio berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Belanja modal, pertumbuhan ekonomi, *lag* tingkat kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan, indeks pembangunan gender dan derajat desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Indikator Makroekonomi, Data Panel

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the determinants of poverty in 38 districts/cities of East Java Province using a macroeconomic data approach sourced from secondary data published by Central Bureau of Statistics (BPS) of East Java Province for 2018-2023. The macroeconomic data indicators used in this research include open unemployment rate, gini ratio, economic growth, gender development index, degree of fiscal decentralization, and capital expenditure. The analysis technique used in solving this research is the FD-GMM panel model. The research results show that open unemployment rate, gini ratio have a significant positive effect on the poverty rate. Capital expenditure, economic growth, lag in the poverty level have a significant negative effect on the poverty level. Meanwhile, gender development index and degree of fiscal decentralization don't have a significant effect on the poverty level in East Java Province.

Keywords: Poverty Level, Macroeconomic Indicators, Panel Data

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dihadapi masyarakat yang mengalami kekurangan materi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi, yang tidak memiliki akses listrik, kebutuhan air bersih, fasilitas sanitasi, dan jasa - jasa lain seperti akses pendidikan, penyediaan layanan kesehatan, dan program bantuan sosial lainnya (Abda & Cahyono, 2022).

Menurut (Todaro & Smith, 2020), kemiskinan adalah pokok permasalahan utama yang dialami sebuah negara untuk menentukan kebijakan pembangunan ekonomi. Kemiskinan sangat erat terhadap perbedaan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, kemampuan dalam bertahan hidup, dan kesempatan untuk mengubah nasib yang lebih

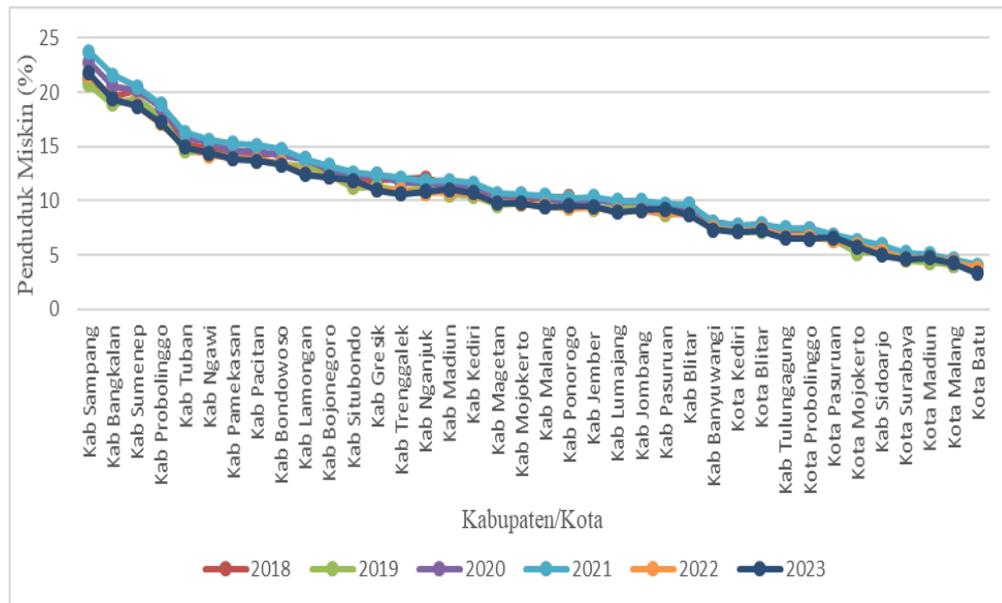
baik. Selain itu, kemiskinan memberikan dampak negatif terhadap proses pembangunan sebuah negara antara lain meningkatnya tingkat kriminalitas di sebuah wilayah, kurangnya akses pendidikan, akses kesehatan, masyarakat yang tidak mendapatkan kehidupan yang layak, serta miskin secara multidimensi seperti kurangnya pengetahuan tentang politik, organisasi masyarakat, teknologi informasi komunikasi, keterampilan, bidang keuangan, dan jaringan sosial (Suripto & Subayil, 2020).

Partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup melalui pemberdayaan wanita sehingga ketimpangan antara pembangunan pria dan wanita semakin mengecil (Subramaniam et al., 2013). Pemberdayaan wanita memiliki dampak



positif terhadap peningkatan kualitas hidup dengan memberikan ruang wanita, mendapatkan posisi strategis untuk mengambil keputusan

penting dalam sebuah organisasi, mendapatkan kehormatan dari kekayaan yang dimiliki (Quiñones et al., 2013).

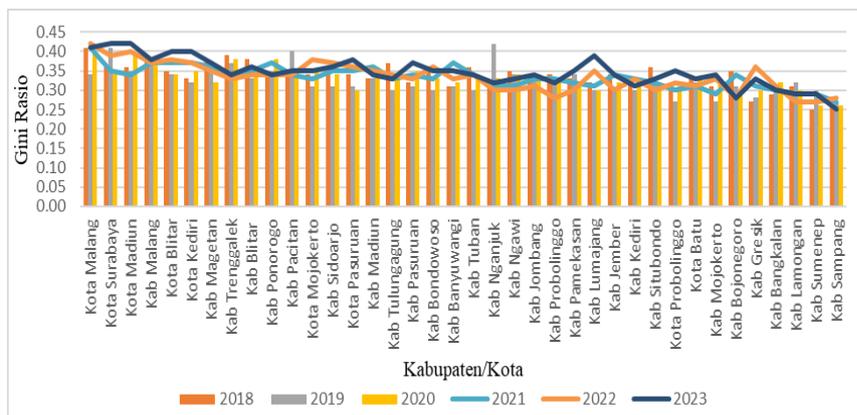


Gambar 1. Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur (%) Tahun 2018 - 2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (2024)

Berdasarkan informasi Gambar 1 menunjukkan bahwa di Provinsi Jawa Timur terdapat 5 kabupaten yang rata - rata persentase penduduk miskin tertinggi selama Tahun 2018 - 2023. Persentase jumlah penduduk miskin yang paling banyak ada di Kabupaten Sampang sebesar 21,76 persen pada Tahun 2023. Selanjutnya, yang kedua adalah Kabupaten Bangkalan dengan rata - rata persentase jumlah penduduk miskin sebesar 20,10, ketiga adalah Kabupaten Sumenep sebesar 19,36 persen, yang

keempat adalah Kabupaten Probolinggo sebesar 18,40 persen, dan peringkat kelima adalah Kabupaten Tuban dengan persentase penduduk miskin sebesar 15,56 persen. Lima kabupaten yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi perlu mendapatkan prioritas dalam mengentaskan kemiskinan, terutama dalam kemudahan akses pendidikan, kesehatan, maupun percepatan pembangunan infrastruktur agar tidak terjebak dalam kantong kemiskinan di Jawa Timur



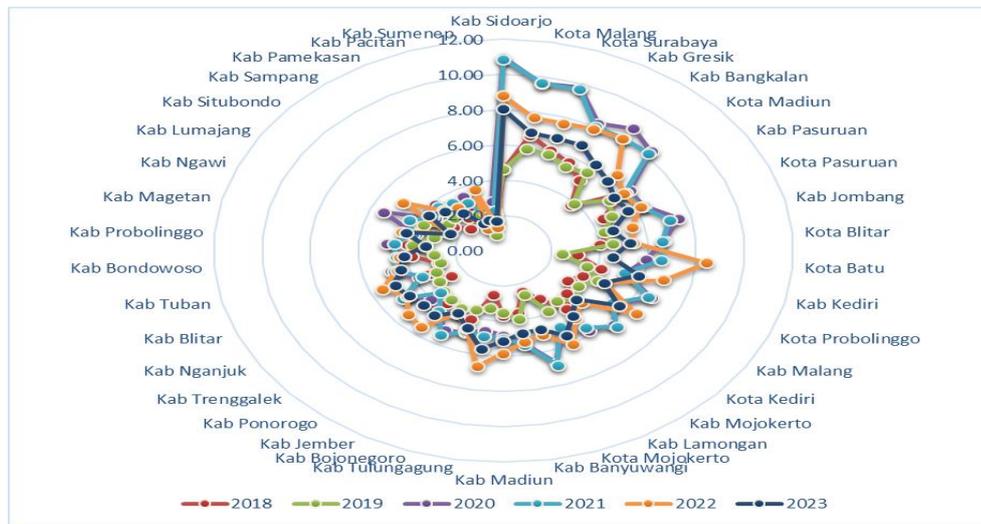
Gambar 2. Gini Rasio Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (2024a)



Dalam Gambar 2 terkait data gini rasio dari 29 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2023 yang menunjukkan bahwa terdapat terdapat 8 kabupaten/kota yang memiliki rata - rata Gini rasio diatas 0,35, yaitu Kota Malang, Kota Surabaya, Kota Madiun, Kabupaten Malang, Kota Blitar, Kota Kediri, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Trenggalek.

Gini rasio merupakan proksi untuk mengukur derajat ketimpangan pendapatan antar wilayah dari 0 sampai 1. Dalam hal ini, kabupaten/kota yang berada di bawah 0,40, kecuali Kota Malang yang memiliki ketimpangan sedang. Ketimpangan pendapatan cenderung berada di perkotaan dibandingkan di pedesaan yang memiliki ketimpangan rendah



Gambar 3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023
 Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (2024c)

Gambar 3 menggambarkan kondisi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023. Rata-rata kabupaten/kota yang memiliki TPT tertinggi diatas 5 persen yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Bangkalan, dan Kota Madiun. Tingkat pengangguran terbuka tertinggi dimiliki Kabupaten Sidoarjo sebesar 10,97 persen pada Tahun 2020. Artinya, dampak covid - 19 menyebabkan banyaknya pekerja yang dirumahkan, bahkan di - PHK sehingga angka pengangguran meningkat cukup tajam dibandingkan dengan daerah lain. Rata-rata TPT terendah dimiliki oleh Kabupaten Sumenep sebesar 2,01 persen, sedangkan TPT rendah dialami oleh kabupaten Pacitan pada Tahun 2019 sebesar 0,91 persen.

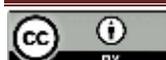
Problematika kemiskinan yang dihadapi oleh Indonesia merupakan fenomena yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggarannya dalam program

pengentasan kemiskinan. Kemiskinan dapat ditanggulangi secara berbeda - beda (Maipita, 2014). Hal ini disebabkan karena bergantung pada kondisi dari tiap - tiap wilayah, seperti kemiskinan di daerah kumuh, kebutuhan pangan yang tidak terpenuhi dengan baik, terbatasnya akses kesehatan, akses pendidikan, kemiskinan di pinggiran perkotaan, ketimpangan pendapatan yang semakin melebar (Iskandar, 2012).

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terbuka, pertumbuhan ekonomi, indeks gini, indeks pembangunan gender, derajat desentralisasi fiskal, dan belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di 38 kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2023

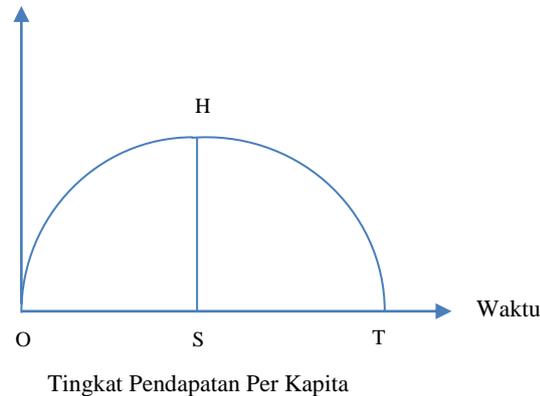
TINJAUAN PUSTAKA

Hipotesis Kuznets atau Kurva U terbalik pada Gambar 4 menjelaskan tentang teori hubungan antara ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan



tingkat pendapatan per kapita. Pada awalnya, peningkatan pendapatan per kapita akan mengakibatkan semakin melebarnya ketimpangan pendapatan sampai pada titik OH. Namun, pada titik HT menunjukkan bahwa

meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan semakin meratanya ketimpangan pendapatan dalam jangka panjang (Anand & Kanbur, 1993).



Gambar 4. Hipotesis Kuznets

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan dapat dilihat pada teori jebakan kemiskinan (*poverty trap*) yang diungkapkan oleh Ragnar Nurkse. Negara-negara yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi disebabkan oleh rendahnya konsumsi dan rendahnya produksi komoditas material. Kurangnya modal menjadi hambatan utama dalam pembangunan ekonomi, sehingga menjadi titik awal dari lingkaran kemiskinan. Penawaran modal ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk menabung. Ketika tabungan rendah, maka pendapatan yang dihasilkan terbatas sehingga konsumsi menurun (Hukum Engels). Standar hidup yang lebih tinggi di kota besar akan mendorong tingkat konsumsi yang tinggi. Masyarakat yang berpenghasilan rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar disebabkan rendahnya produktivitas tenaga kerja dan modal. Permintaan modal bergantung pada kemampuan perusahaan untuk berinvestasi. Ketika perusahaan berinvestasi di negara miskin, maka penghasilan yang dihasilkan rendah. Namun, sedikit menutupi dampak lingkaran kemiskinan karena perusahaan membuka lapangan kerja baru. Menurut Nurkse, pola investasi yang seimbang di sejumlah industri akan berdampak pada masyarakat yang lebih produktif sehingga angka kemiskinan menurun (Bass, 2011).

Isu penelitian tentang kemiskinan sudah banyak dilakukan. Hasil studi (Fajriah, 2021) menyatakan bahwa pengangguran memiliki korelasi yang cukup kuat dengan kemiskinan, dimana peningkatan tingkat pengangguran akan

diikuti dengan meningkatnya angka kemiskinan. Kemiskinan disebabkan karena rendahnya penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat. Abda & Cahyono (2022), (Agustin & Sumarsono, 2022) menyimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian dari (Muhammad & Dima, 2022) dengan pemilihan model terbaik dari hasil uji regresi data panel yaitu model efek tetap, menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTT Tahun 2017 - 2021. Hasil penelitian tersebut diperkuat oleh temuan dari (Suci et al., 2023) yang menyatakan bahwa tingginya angka pengangguran tidak berdampak terhadap angka kemiskinan di DIY.

Hasil penelitian (Mahendra & Wibowo, 2023) menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan tidak berpengaruh signifikan di Provinsi Aceh. Hal ini disebabkan banyak aset yang dikuasai oleh kelompok orang kaya dibandingkan dengan kelompok miskin. Maulidiyah et al., (2022) menyimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan yang tidak berpengaruh terhadap kemiskinan disebabkan pendapatan per kapita yang ada belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Bali. Studi Aprillia et al., (2021) menemukan bahwa ketimpangan pendapat berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat yang sebagian besar dimiliki oleh masyarakat miskin.

Penelitian tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan telah banyak dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Putra & Suharto, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB ADHK memiliki hubungan signifikan negatif terhadap kemiskinan di DIY. Penelitian tersebut sejalan dengan temuan dari (Yulyanah, 2023), yang menyatakan bahwa PDRB yang tinggi memiliki peran penting dalam menurunkan angka kemiskinan di NTT. Berbeda dengan temuan (Ochi, 2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak cukup untuk mengurangi angka kemiskinan. Akan tetapi, perlu diikuti dengan kebijakan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan baik di saat ini maupun di masa yang akan datang dengan intervensi pemerintah dan dukungan politik yang tepat.

Salam & Wahab (2023) meneliti tentang pengaruh indeks pembangunan gender (IPG) terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 - 2021 menggunakan analisis jalur. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara langsung IPG berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena skor IPG di Sulsel yang semakin membaik. Hal ini dapat dilihat dengan semakin membaiknya kesetaraan gender dalam aspek kesehatan, pendidikan, partisipasi dan penghasilan yang diterima oleh kaum Wanita. Hasil berbeda dilakukan oleh (Suparman, 2021) yang menemukan bahwa IPG berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia Tahun 2015 - 2020.

Penelitian tentang pengaruh desentralisasi fiskal terhadap tingkat kemiskinan sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Wibowo & Oktivalerina (2022) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat nasional dan wilayah Indonesia barat. Sedangkan pada tingkat Indonesia bagian timur menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan belum optimalnya belanja daerah yang berbasis pada pelayanan dasar seperti Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat. Muhammad & Dima (2022) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di NTT. Berbeda dengan hasil penelitian (Syamsul, 2020) yang menyatakan

bahwa desentralisasi fiskal yang diukur dengan belanja daerah terhadap total pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Abdillah & Mursinto (2016) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan dalam jangka pendek. Oleh karena itu, peran pejabat pemerintah diperlukan untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.

Wati (2015) meneliti tentang pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemiskinan di 33 Provinsi Indonesia Tahun 2009 - 2013 dengan data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal yang merupakan bagian dari penguatan pada sumber daya modal daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan temuan dari studi (Sendouw et al., 2019). Kesimpulan dari penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado Tahun 2006 - 2015. Belanja modal dari pengadaan aset dan perbaikan sarana prasarana yang disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna akan menurunkan angka kemiskinan.

Hasil penelitian kemiskinan yang sudah dipetakan menunjukkan bahwa teknik analisis yang banyak digunakan adalah model regresi data panel, model regresi linier berganda (OLS), dan analisis jalur. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dwiningwarni et al., 2019) tentang populasi, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh (Yoga & Diputra, 2024) tentang faktor - faktor kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi masing - masing menggunakan model analisis jalur. Penelitian tentang topik yang menggunakan model OLS yaitu (Amalia, 2017); (Sudewi & Wirathi, 2013); (Sendouw et al., 2019). Sebagian besar penelitian yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel. Salah satu temuan yang dilakukan oleh (Mahendra & Wibowo, 2023) menggunakan regresi data panel (model efek tetap), menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh Selama periode 2017 - 2020.

Oleh karena itu, Peneliti menawarkan model regresi data panel dinamis FD - GMM (*first difference - Generalized Method of Moment*) yang memiliki keunggulan dibandingkan model regresi data panel (Baltagi, 2008). Penggunaan model FD - GMM dapat mengontrol bias secara



simultan yang disebabkan variabel eksplanatorinya endogenous, untuk mengontrol antar - negara/wilayah yang tidak bisa dilihat dummy pada negara/wilayah yang spesifik sehingga perlu menggunakan struktur dinamis pada persamaan regresi (Verbeek & Nijman, 1992). Secara natural, struktur data panel yang menggunakan data makroekonomi memiliki perubahan yang dinamis, penggunaan panel dinamis menghasilkan estimasi yang konsisten dari beberapa parameter (Arellano & Bond, 1991). Model panel GMM tergolong dalam *micro - panels*, yaitu dengan jumlah wilayah/individu lebih besar dibandingkan jumlah periode waktunya, dengan jumlah 38 kabupaten/kota selama 6 tahun atau sebanyak 228 observasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan metode penelitian yang dilakukan untuk memecahkan masalah determinan tingkat kemiskinan di Jawa Timur dengan regresi panel FD - GMM. Hal ini disebabkan data yang digunakan merupakan data panel dari 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2023 yang bersumber dari data sekunder yang diterbitkan oleh BPS Provinsi Jawa Timur (2023).

Persamaan model panel FD - GMM dalam penelitian ini yaitu:

$$TKEM_{it} = \beta_1TKEM(-1)_{t-1} + \beta_2TPENG_{it} + \beta_3PEK_{it} + \beta_4GINR_{it} + \beta_5IPGEN_{it} + \beta_6DDES F_{it} + \beta_7PBM_{it} + \lambda_i + \mu_{it} \dots\dots\dots$$

(1)
 Dimana: *TKEM* = tingkat kemiskinan, *TKEM(-1)* = kelambanan (*lag*) tingkat kemiskinan, *PEK* = pertumbuhan ekonomi, *GINR* = Gini Rasio, *IPGEN* = indeks pembangunan gender, *DDES F* = derajat desentralisasi fiskal, *PBM* = pertumbuhan belanja modal.

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan software Eviews 12. Metode panel FD - GMM diestimasi dengan menambahkan kelambanan (*lag*) variabel dependen dalam variabel independen dan instrumen variabel untuk menghasilkan hasil estimasi yang konsisten dan tidak bias (Hsiao, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan estimasi panel GMM, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan uji spesifikasi model dengan membandingkan estimator dari model efek tetap (*fixed effect model*), model GMM (*Generalized Method of Moment*), dan model efek acak (*random effect model*) (Blundell et al., 2001). Tujuannya untuk melihat bahwa pemilihan model GMM sudah memenuhi kriteria tidak bias. Hasil perbandingan Tabel 1 menunjukkan estimator model GMM berada diantara CEM dan FEM, yaitu $0,126940 < 0,397553 < 0,947207$. Artinya, model GMM tidak bias sehingga layak digunakan untuk interpretasi model dibandingkan model regresi data panel statis.

Tabel 1. Perbandingan Estimator FEM, GMM, dan CEM

Fixed Effect Model (FEM)	GMM	Common Effect Model (CEM)
0,126940	0,397553	0,947207

Sumber : Eviews12, diolah

Dalam model panel GMM, uji konsistensi diperlukan untuk melihat model yang digunakan konsisten dengan uji autokorelasi (Arellano & Bond, 1991). Model dapat dikatakan konsisten jika nilai statistik yang signifikan m_1 dan nilai m_2

yang nilai statistiknya tidak signifikan. Menurut Tabel 2, hasil estimasi model bersifat konsisten karena nilai prob AR(2) sebesar $0,9533 > 10\%$ (H_0 diterima)

Tabel 2. Hasil Uji Arellano Bond (AB)

Test Order	m-Statistic	Rho	SE(rho)	Prob.
AR(1)	-1,350188	-278,066	205,946306	0,1770
AR(2)	0,058546	3,541628	60,493593	0,9533

Sumber: Eviews 12, diolah

Uji validitas pada model panel FD - GMM dalam software Eviews ini menggunakan uji Sargan. Uji sargan digunakan untuk mengetahui penggunaan variabel instrumen melebihi jumlah parameter yang diestimasi atau dalam kondisi

overidentifying restrictions (Dahlberg et al, 2002). Dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Prob (J-statistic) sebesar 0,641268, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen yang digunakan dalam model ini valid



Tabel 3. Hasil Olah Data Model FD - GMM Tingkat Kemiskinan

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistic	Prob.
TKEM(-1)	-0,397553	0,179591	-2,213658	0,0331**
TPENG	0,858852	0,198352	4,329946	0,0001*
PEK	-0,262202	0,061562	-4,259130	0,0001*
GINR	8,538784	3,673621	2,324351	0,0257**
IPGEN	-0,495225	0,442328	-1,119588	0,2701
DDESf	-7,186939	4,844467	-1,483536	0,1464
PBM	-0,022159	0,005497	-4,030748	0,0003*
Root MSE	1,543872		Mean dependent var	-0,135066
S.D. Dependent var	0,767118		S.E. of regression	1,580698
Sum squared resid	362,2980		J-statistic	5,153244
Instrument rank	14		Prob(J-statistic)	0,641268

Sumber: Eviews12, diolah

Keterangan: *signifikan $\alpha=1\%$, ** signifikan $\alpha=5\%$

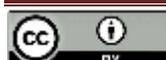
Hasil olah data determinan kemiskinan di Jawa Timur menggunakan model FD - GMM (*First Difference-Generalized Method of Moment*) dapat dilihat pada Tabel 3. Persamaan struktural model panel dinamis dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$TKEM_{it} = - 0,397553TKEM(-1)_{i,t-1} + 0,858852TPENG_{it} - 0,262202PEK_{it} + 8,538784GINR_{it} - 0,495225IPGEN_{it} - 7,186939DDESf_{it} - 0,022159PBM_{it} + \lambda_i + \mu_{it} \dots\dots\dots (2)$$

Menurut keterangan Tabel 3 dapat dijelaskan bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka (TPENG) berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan (TKEM) pada tingkat $\alpha = 1\%$. Hal ini bisa dilihat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $4,329946 > 2,35234$ dengan nilai $p-value$ prob sebesar $0,0001 > 0,01$ (Ho ditolak). Nilai t tabel didapatkan dari jumlah observasi yang sudah di-*adjustment* (n) dikurangi dengan jumlah variabel yang ada di dalam model (k), sehingga *degree of freedom* (df) dalam model ini sebesar $df = n - k = 152 - 6 = 145$. Dengan melihat tabel t untuk $\alpha=1\%$ dan $df = 145$ yaitu sebesar $2,35234$. Nilai koefisien variabel TPENG memiliki makna bahwa kenaikan tingkat pengangguran terbuka sebesar 1% akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar $0,858852$. Jadi, semakin tinggi angka pengangguran maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan. Tingginya angka pengangguran disebabkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu menampung banyaknya jumlah penawaran tenaga kerja. Oleh karena itu, jumlah angkatan kerja yang menganggur yang tidak terserap di Dunia kerja, dapat melakukan kegiatan berwirausaha. Hasil penelitian ini

sejalan dengan temuan dari (Fajriah, 2021); (Abda & Cahyono, 2022) dan (Agustin & Sumarsono, 2022). Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa secara statistik, variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat $\alpha = 1\%$. Hipotesis menunjukkan bahwa Ho ditolak karena nilai t_{hitung} sebesar $-4,259130$ lebih besar daripada t_{tabel} sebesar $2,35234$. Koefisien pertumbuhan ekonomi sebesar $-0,262202$ memiliki arti bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur sebesar $0,262202$. Barang dan jasa yang dihasilkan dari peningkatan angka PDRB memiliki peran penting dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan perlu dilakukan dengan semakin membaiknya sarana prasarana agar kegiatan ekonomi tidak terganggu sehingga dampaknya tingkat kemiskinan semakin menurun. Hasil temuan ini searah dengan penelitian dari (Putra & Suharto, 2023) dan (Yulyanah, 2023).

Koefisien gini rasio sebesar $8,538784$ menunjukkan bahwa kenaikan Gini rasio sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar $8,538784$. Variabel gini rasio berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat $\alpha = 5\%$. Hal ini bisa dilihat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $2,324351 > 1,65543$ dengan nilai $p-value$ prob sebesar $0,0257 > 0,05$ (Ho ditolak). Gini rasio mengukur ketimpangan pendapatan antar daerah, yang mana memiliki skor 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka ketimpangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin semakin tinggi. Sebaliknya, semakin mendekati 0, maka ketimpangan pendapatan antara orang berpendapatan tinggi dan orang berpendapatan rendah semakin rendah. Dalam model pada Tabel 3 menunjukkan bahwa



variabel gini rasio memiliki koefisien tertinggi dibandingkan variabel lain. Untuk itu, prioritas utama dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur adalah dengan mengurangi ketimpangan pendapatan agar kue pembangunan bisa dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Timur. Penelitian ini sejalan dengan temuan (Aprillia et al., (2021) dan bertolak belakang dengan temuan (Maulidiyah et al., (2022) dan (Mahendra & Wibowo, 2023).

Menurut Tabel 3 dapat disimpulkan bahwa variabel indeks pembangua gender (IPGEN) dan derajat desentralisasi fiskal (DDEF) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (TKEM) baik pada tingkat $\alpha = 1\%$, 5% , 10% . Hal ini bisa dilihat dari nilai p-value dari variabel IPGEN dan DDEF masing-masing sebesar $0,2701$ dan $0,1464 > 10\%$ (Ho diterima). Kesetaraan gender perlu dilakukan agar ketimpangan pembangunan atau kesejahteraan antara pria dan wanita semakin merata sehingga tujuan SDGs bisa terwujud. Berikutnya, derajat desentralisasi fiskal yang diukur dengan semakin tinggi rasio PAD terhadap penerimaan daerah dapat dikatakan daerah tersebut semakin mandiri dalam mengelola keuangan daerah. Akan tetapi, daerah kabupaten/kota yang ada belum mampu menekan tingkat kemiskinan sehingga diperlukan kebijakan pengeluaran pemerintah daerah yang diprioritaskan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim.

Koefisien belanja modal sebesar $-0,022159$ menunjukkan bahwa kenaikan belanja modal sebesar 1% akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar $0,022159$. Variabel belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat $\alpha = 1\%$. Hal ini bisa dilihat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu sebesar $-4,030748 > 2,35234$ dengan nilai $p - value$ prob sebesar $0,0003 > 0,01$ (Ho ditolak). Pengeluaran belanja modal yang berorientasi pada perbaikan sarana prasarana akan mendorong kesempatan kerja dan percepatan pembangunan sehingga tingkat kemiskinan menurun. Penelitian ini sejalan dengan temuan dari (Wati, 2015) dan (Sendouw et al., 2019).

KESIMPULAN

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan adalah panel FD-GMM, yang bertujuan untuk mengetahui determinan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 - 2023. Secara statistik, tingkat pengangguran terbuka dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan

signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat $\alpha = 1\%$. Sedangkan, tingkat ketimpangan yang diukur dengan gini rasio berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat $\alpha = 5\%$ dengan nilai koefisien tertinggi dibandingkan variabel bebas lainnya. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan pada tingkat $\alpha = 1\%$. Kelambanan tingkat kemiskinan memiliki tingkat signifikansi pada pada tingkat $\alpha = 5\%$ terhadap tingkat kemiskinan. Berbeda dengan indeks pembangunan gender dan derajat desentralisasi fiskal yang tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan baik pada tingkat $\alpha = 1\%$, 5% , dan 10% .

Saran yang bisa direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah untuk menekan tingkat kemiskinan di Jawa Timur dapat dilakukan dengan membuka lapangan kerja baru agar tingkat pengangguran menurun. Strategi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan perlu dilakukan pemerintah daerah setempat agar tingkat kemiskinan menurun. Selain itu, pemerataan pembangunan menjadi poin penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan antara masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah. Alokasi anggaran belanja modal sangat diperlukan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Perbaikan pembangunan kesetaraan gender perlu diupayakan untuk mengurangi ketimpangan antara pria dan wanita dalam aktivitas ekonomi. Penerimaan daerah berupa Pajak Asli Daerah (PAD) perlu dialokasikan secara tepat sasaran dalam pengeluaran pemerintah daerah melalui program pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abda, S. A., & Cahyono, H. (2022). Apakah IPM, Pengangguran, Dan Pendapatan Perempuan Berpengaruh Dalam Menurunkan Kemiskinan Di Kota Surabaya? INDEPENDENT: Journal of Economics, 2(1), 61–76.
- Abdillah, K., & Mursinto, D. (2016). The effects of fiscal decentralization, economic growth and income inequality on poverty rate of Indonesia's 33 provinces. International Journal of Advanced Research, 4(2), 405–414.
- Agustin, L., & Sumarsono, H. (2022). Pengaruh pengangguran, IPM, dan bantuan sosial terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi



- Universitas Kadiri, 7(2), 263–286.
- Amalia, A. (2017). Pengaruh pendidikan, pengangguran dan Ketimpangan gender terhadap kemiskinan di Sumatera utara. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(2), 324–344.
- Anand, S., & Kanbur, S. M. R. (1993). The Kuznets process and the inequality—development relationship. *Journal of Development Economics*, 40(1), 25–52.
- Aprillia, A., Wardhani, R. S., & Akbar, M. F. (2021). Analysis of factors affecting poverty in the province of the Bangka Belitung Islands. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(2), 188.
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. *The Review of Economic Studies*, 58(2), 277–297.
- Baltagi, B. H. (2008). *Econometric analysis of panel data* (Vol. 4). Springer.
- Bass, H. H. (2011). Ragnar Nurkse's development theory: Influences and perceptions. *Ragnar Nurkse (1907-2007): Classical Development Economics and Its Relevance for Today*, 183–202.
- Blundell, R., Bond, S., & Windmeijer, F. (2001). Estimation in dynamic panel data models: improving on the performance of the standard GMM estimator. *Nonstationary Panels, Panel Cointegration, and Dynamic Panels*, 53–91.
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2023). Provinsi Jawa Timur dalam Angka 2023. <https://jatim.bps.go.id/publication/2023/02/28/446036fbb58d36b009212dbc/provinsi-jawa-timur-dalam-angka-2023.html>
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2024a). Gini Rasio Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2018-2023. <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/488/1/gini-rasio-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2024b). Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur (Persen), 2018-2023. <https://jatim.bps.go.id/indicator/23/497/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-timur.html>
- BPS Provinsi Jawa Timur. (2024c). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (Persen), 2018-2023. <https://jatim.bps.go.id/indicator/6/54/1/tingkat-pengangguran-terbuka-tpt-menurut-kabupaten-kota.html>
- Dahlberg, M., Johansson, E., & Tovmo, P. (2002). Power properties of the Sargan test in the presence of measurement errors in dynamic panels. Working Paper
- Damanik, M. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(2), 142-154.
- Dwiningwarni, S. S., Aslichah, A., Ariyanto, A., Titin, T., & Yusuf, M. (2019). Population, unemployment and poverty: A population analysis in East Java Indonesia.
- Damanik, M. (2022). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(2), 142-154
- Fajriah, N. A. (2021). Analysis of The Effect of Gross Regional Domestic Product, Number of Population, Regional Minimum Wage, Open Unemployment Rate, and Human Development Index on Poverty in 2010-2020 East Java Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 6(2), 171–187.
- Hsiao, C. (2022). *Analysis of panel data* (Issue 64). Cambridge university press.
- Iskandar, A. (2012). *Paradigma Baru" Benchmarking Kemiskinan"*.
- Mahendra, W., & Wibowo, M. G. (2023). The Effect of Income Inequality, Women's Empowerment, Unemployment and Population Density on Poverty in Aceh Province. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 8(1), 11.
- Maipita, I. (2014). Mengukur kemiskinan & distribusi pendapatan. *Upp Stim Ykpn*.
- Maulidiyah, F. S., Muchtolifah, & Sishadiyati. (2022). Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Ketimpangan Pendapatan Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Bali. *Upn" Veteran" Jawa Timur*.
- Muhammad, F., & Dima, Y. K. (2022). Desentralisasi Fiskal dan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Statistika Terapan* (ISSN 2807-6214), 2(02), 11–24.
- Ochi, A. (2023). Inequality and the impact of growth on poverty in sub-Saharan Africa:



- A GMM estimator in a dynamic panel threshold model. *Regional Science Policy & Practice*, 15(6), 1373–1395.
- Putra, A. R., & Suharto. (2023). Determinan kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 143–148.
- Quiñones, M., Van den Broeck, A., & De Witte, H. (2013). Do job resources affect work engagement via psychological empowerment? A mediation analysis. *Revista de Psicología Del Trabajo y de Las Organizaciones*, 29(3), 127–134.
- Salam, A., & Wahab, A. (2023). Efek Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 3(2), 68–80.
- Sanniana Sidabutar, Elidawaty Purba, & Pauer Darasa Panjaitan. (2020). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan Dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten Simalungun. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 86–101. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i2.109>
- Sendouw, A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, D. C. (2019). Pengaruh belanja modal, belanja sosial, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di kota Manado. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 18(5).
- Sinaga, M., Damanik, S. W. H., Zalukhu, R. S., Hutaeruk, R. P. S., & Collyn, D. (2023). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Per Kapita Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kepulauan Nias. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 140-152
- Subramaniam, G., Tan, P.-L., Maniam, B., & Ali, E. (2013). Workplace flexibility, empowerment and quality of life. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 105, 885–893.
- Suci, L. E., Addainuri, M. I., & Abidin, M. (2023). The Effect Of Economic Growth, Education, Unemployment, And Human Development Index On Poverty In The Special Region Of Yogyakarta For Period 2015-2021. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 8(2).
- Sudewi, N. N. A., & Wirathi, I. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(3), 44435.
- Suparman. (2021). Gender Development And Empowerment Effect On Income Inequality And Poverty. *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science*, 2(2), 159–165.
- Suripto, S., & Subayil, L. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, pengangguran pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di di Yogyakarta priode 2010 - 2017. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 127–143.
- Syamsul, S. (2020). Desentralisasi fiskal dan tingkat kemiskinan di indonesia. *AKUNTABEL: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 17(1), 140–147.
- Tarigan, W. J. (2020). Pengaruh Pendapatan Domestik Regional Bruto Perkapita Dan Rasio Beban Ketergantungan Hidup Terhadap Tabungan Domestik Sumatera Utara. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(2), 135-148
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development*. Pearson UK.
- Verbeek, M., & Nijman, T. (1992). Testing for selectivity bias in panel data models. *International Economic Review*, 681–703.
- Wati, H. (2015). Analisis Pengaruh Belanja Modal Daerah, Investasi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2009-2013 (Studi Kasus Pada 33 Provinsi). Universitas Brawijaya.
- Wibowo, E. A., & Oktivalerina, A. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan pada Kabupaten/Kota: Studi Kasus Indonesia pada 2010-2018. *Bappenas Working Papers*, 5(1), 97–119.
- Yoga, G. A. D. M., & Diputra, G. I. S. (2024). Analisis Data Panel Determinan Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekuilnomi*, 6(1), 1–15.
- Yulyanah. (2023). Faktor Determinan Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019. *Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara*, 8(1), 118–137.

